

## Bencana Alam 2009 Berbalut Ragam Prestasi

Garut tidak lama lagi akan bertambah usianya, seiring dengan setahun kepemimpinan Aceng H.M. Fikri, S.Ag, dan R. Diky Candra sebagai orang nomor satu dan dua di negeri yang konon dijuluki Swiss Van Java ini. Sebagai dua sosok muda usia, dengan segala keterbatasan pengalaman di lingkungan birokrasi, tepat tanggal 23 Januari 2009, pasangan ini resmi dilantik di Gedung DPRD Kabupaten Garut, sebagai presentasi kepercayaan masyarakat Kabupaten Garut melalui jalur perseorangan, yang dinilai banyak orang sebagai sebuah kemajuan masyarakat Kabupaten Garut dalam mengepresikan demokrasinya, tidak tanggung-tanggung kandidat lain yang diusung partai-partai penuh pengalaman pun seperti tak berdaya dengan kekuatan masyarakat (people power). Dan lebih bangganya, kegalauan para pemerhati, pemerintah kana terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan menyangkut stabilitas daerah agraris ini sedikit pun tidak terbukti, justru hampir 75 % masyarakat turut mendukung dengan adanya Pemilu Bupati Garut ini.

Sekilas proses politik itu kini telah mencapai usia setahun, masyarakat Kabupaten Garut yang kritis tentu berharap banyak dari dua pasangan ini. Dalam upaya mengejar ketinggalan, Kabupaten Garut kini berupaya keras agar indeks kesehatan lebih meningkat, melalui peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas pelayanan Puskesmas di daerah-daerah, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Lebih penting lagi, diperlukan pengembangan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dinilai masih jauh dari harapan. Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan SDM tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bupati Garut, dalam suatu kesempatan mengungkapkan berbagai permasalahan tersebut akan dapat segera diatasi, hanya dengan bekal semangat kebersamaan. *"Semua permasalahan tersebut, tentunya memerlukan pemikiran dan penyelesaian yang bijaksana untuk mengatasinya"*, ujarnya.

Pemkab Garut, kini dihadapkan pula pada permasalahan pembenahan birokrasi yang kerap menjadi tuntutan masyarakat akhir-akhir ini. Melalui Strategi Dasar Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pemkab Garut berupaya menjawab tuntutan masyarakat, salah satunya, melalui strategi pokok dengan optimalisasi kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

Optimalisasi ini dilakukan dengan langkah peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek.

Langkah lain dalam optimalisasi ini adalah peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya, adalah memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran.

Kini, seluruh jajaran Pemkab Garut tengah memfokuskan diri dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. Salah satunya dengan menciptakan stabilitas pemerintahan, stabilitas politik, dan stabilitas dunia usaha. RPJMD ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan.

Salah satu fokus perhatian pemerintah daerah saat ini adalah tentang kebijakan keuangan daerah yang perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam upaya mewujudkan Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam

Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalan sumber pembiayaan serta melakukan efisiensi belanja disertai dengan meningkatkan keselarasan antara fungsi perencanaan dengan penganggaran dan mengefektifkan fungsi pengawasan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi perlu dilakukan pada dana penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut. Demikian halnya dengan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Garut. Untuk itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Berkenaan dengan upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan ekonomi masyarakat, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership* dengan mendorong peningkatan partisipasi swadaya masyarakat.

Tiga fokus sasaran pasaca dilantiknya kedua pasangan ini, telah dilaluinya dengan penuh dinamika. Dalam stabilitas pemerintahan saja, hal ini dapat tercapai dengan bahu-membahu antara pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungannya, serta seluruh unsur masyarakat. Stabilitas politik dapat tercapai dengan terpeliharanya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan stabilitas dunia usaha dapat tercapai dengan upaya memberikan jaminan kepada para pelaku dunia usaha menjalankan usahanya di Kabupaten Garut.

Tidak berlebihan kiranya, bila Kabupaten Garut tahun 2009 memberikan komitmen sebagai Tahun Politik. Komitmen ini bisa dibuktikan dengan dicanangkannya Sukses Pemilu 2009. Bupati dan Wakil Bupati Garut, menyerukan agar seluruh komponen dapat ikut andil menyukseskan Pemilu Tahun 2009, mulai dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Alhasil, dukungan kearah tersebut mulai diupayakan dengan sosialisasi ke berbagai unsur mulai dari unsur birokrasi hingga masyarakat. Bahkan dikeluarkan pula himbauan tentang netralitas dalam pelaksanaan kampanye. Belum lagi, dukungan fasilitas lain yang terus diupayakan. Semua itu merupakan komitmen seluruh komponen agar pelaksanaan pemilu di Kabupaten Garut dapat dijadikan tolok keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat dan nasional. Tercatat jumlah hak pilih untuk Pemilu tahun itu adalah 1.598.311 orang, dengan tingkat partisipasi hak pilih sebesar 70 persen. Bukan tidak mungkin, Bupati beserta jajarannya bertekad tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2013 dan Pemiluu 2014 lebih besar dari 75 %.

Dalam masalah birokrasi, Pemkab Garut dihadapkan banyaknya harapan dan tuntutan masyarakat untuk membenahi permasalahan birokrasi yang disadari atau tidak dapat berimplikasi terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mewanti-wanti aparatnya untuk tetap konsisten melayani masyarakat, tanpa pamrih.

Meski demikian, Aceng H.M. Fikri, menghimbau agar semua pihak menempatkan kembali birokrasi pada ruang yang benar, yaitu organisasi pelayanan publik yang didalamnya terdapat aparatur profesional yang mengetahui, memahami, mampu memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat, serta mau dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelanggan yang dilayaninya.

Aparatur profesional dapat terbentuk dengan pribadi yang disiplin. Tahun inilah pasangan ini bertekad membereskan segenap aparatur dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya kedisiplinan pegawai. Bupati Aceng Fikri, bertekad menerapkan disiplin disemua lini, ia pun akan menindak tegas aparatur PNS yang bertindak indisipliner. Hasilnya, selama satu tahun terakhir 2009, tercatat 12 orang terkena sanksi hukum disiplin, mulai dari pemberhentian sementara, pengurangan gaji, penurunan dan penangguhan kenaikan pangkat. Ia pun tidak pandang bulu dalam

menerapkan sanksi ini, setingkat camat pun bisa saja ia hentikan, bilamana bisa merusak citra pemerintahannya.

Permasalahan lain pun terus menggelayuti daerah ini, pasca krisis kepemimpinan pada tahun 2007 lalu, salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Melalui fakta integritas, maka diharapkan seluruh pejabat di lingkungannya dapat memegang teguh fakta integritas ini.

Pada akhir Tahun 2009, tepatnya Rabu, tanggal 2 September 2009, Kabupaten Garut mengalami musibah Gempa Bumi, mengakibatkan hancurnya infrastruktur, rumah, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah lainnya. Dengan kerugian material sebesar Rp 44,7 Milyar. Berdasarkan data verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi menyebabkan kerusakan di Kabupaten Garut dengan kategori rusak berat pada 7.612 rumah, rusak sedang 17.990 rumah, dan rusak ringan 20.273 rumah. Total perkiraan kerugiannya mencapai Rp 541.988.550.000 di Kab. Garut. Disusul kerugian fasilitas sosial Rp 198.667.224.000, lintas sektor Rp12.262.064.000, sehingga total kerugian seluruhnya mencapai Rp752.917.838.000. Kerugian tersebut belum terhitung akibat infrastruktur serta ekonomi produktif.

Dalam pola penyaluran tersebut, akan diatur jumlah uang yang diterima setiap kelompok masyarakat (pokmas) yang berjumlah 10-15 kepala keluarga. *"Yang mengatur penyaluran dana mereka masing-masing sehingga tahu rumah mana yang perlu perbaikan segera. Kalau tidak diatur dari sekarang, dana yang turun malah menimbulkan masalah baru karena akan muncul oknum yang ingin mendapat bagian dari uang tersebut meski bukan korban gempa,"* ungkap Wakil Bupati Diky Candra pada satu kesempatan.

Dana yang diterima baru sekitar Rp 28 miliar sebagai termin pertama, ditambah Rp 44,7 miliar dari Pemprov. Jabar untuk perbaikan rumah rusak berat dan sedang. Pemkab Garut malah telah mengalokasi dana sekitar Rp 20 miliar untuk perbaikan rumah rusak ringan pada tahun ini. Namun hingga kini aliran dana tersebut belum dapat digunakan, pasalnya pihak Pemkab masih menunggu payung hukumnya dalam mendistribusikan dana tersebut, meski dana tersebut sudah tersimpan aman. *"Saya berharap para kepala desa, dan aparat serta masyarakat dapat memahami semua ini, karena dana ini bukan tabungan masyarakat, perlu ada juknis yang mengatur ini, bila kita tidak mau melakukan kesalahan seperti daerah lain,"* tegas bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan, di Gedung pendopo belum lama ini.

Catatan kecil inilah yang menorehkan tinta perjalanan kedua pasangan ini, tinta itu bisa bertuliskan merah, hitam, bahkan emas sekalipun, namun semua itu dinamika yang melengkapi perjalanan sosok dua anak muda yang datang dari dunia berbeda. Aceng adalah dicetak dari kalangan santri tukang kerupuk yang begitu kental dekat dengan masyarakat bawah, sedangkan Diky Candra ia datang dari dunia sinematografi yang telah mengenyam pahitnya hidup sebagai pengamen jalanan.

Beberapa catatan tinta emas yang telah ditorehkan kedua pasangan ini antara lain, untuk yang ketiga kalinya meraih Anugerah Adipura, sebagai lambang supremasi dalam pengelolaan lingkungan. Anugerah itu diterima langsung bupati di sela-sela acara Hari Lingkungan Sedunia, di Istana Negara Jakarta oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun itu pula, selang lima hari setelah meraih adipura, bupati atas nama pemerintah dan masyarakat meraih prestasi tingkat nasional karena dinilai telah berhasil dalam Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan produksi beras di atas 5%. *"Semua ini merupakan jerih payah para petani kita,"* ujarnya sesaat setelah menerima penghargaan itu. Meski demikian, bupati berharap agar prestasi sebagai daerah swasembada beras dan palawija dapat terus dipertahankan, sehingga dapat menopang ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut, umumnya di wilayah Jawa Barat dan nasional.

Selama tahun 2009, Kabupaten Garut mengalami peningkatan produksi padi sebesar 9,03 persen atau sebanyak 730.000 ton, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 680.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Selama ini produksi padi rata-rata setiap tahunnya mencapai 681.104 ton GKG, terdiri dari 614.171 ton GKG padi sawah serta 66.933 ton GKG padi gogo pada areal seluas 87,85 ha. *"Saya gembira Garut mendapat penghargaan kembali dalam skala nasional,"* kata Tatang Hidayat, MP, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Garut. Tercatat seluas 50,227 ha menjadi sentra produksi di 41 kecamatan dengan hasil produksi rata-rata 427.610 ton tiap tahunnya. Sedangkan satu kecamatan lagi (Kecamatan Cikajang) hingga kini masih didominasi komoditas sayur-sayuran.

Bidang pemerintahan, Kabupaten Garut kembali meraih prestasi dalam lomba desa tingkat nasional. Kali ini giliran Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan, meraih jura pertama, namun sayang diperhelatan Hari Proklamasi RI, desa ini kepala desanya tidak dapat bertatap muka langsung dengan presiden, direncanakan tahun ini diberi kesempatan untuk bertatap

muka dengan presiden RI dan para kades lainnya di seluruh Indonesia akan berkumpul di Istana Merdeka.

Dalam bidang pelayanan, Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Garut atas prestasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna air minum di Kabupaten Garut.

Prestasi akhirnya ditutup dengan peraih perak oleh delegasi Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Garut, dengan meraih perak di ajang *Kuala Lumpur International Drum Band Competition 2009*, yang digelar oleh Pemerintahan di Malaysia pada tanggal 15 hingga 20 Desember 2009. Kontingen Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Garut merupakan satu-satunya kontingen Drum Band yang mewakili Indonesia untuk mengikuti event yang digelar secara rutin (setahun sekali). PDBI Kabupaten Garut berhasil memperoleh poin sebanyak 82,79 yang bersaing di final bersama kontingen dari Singapura Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Wakil Bupati R. Diky Candra, menyebutnya delegasi ini sebagai duta wisata Garut, karena targetnya pun bukan juara, namun duta-duta ini akan memberikan warna Garut di mata internasional. *"Kalian adalah para pelukis yang akan mewarnai Garut di mata internasional"*, katanya penuh harap. Kompetisi ini menjadi momen penting bagi Kabupaten Garut di mata internasional untuk memperkenalkan wajah Garut, mulai dari alamnya, produk kerajinannya, kuliner, hingga produk pertanian yang diharapkan akan menarik minat negara lain untuk berkunjung ke daerah tropis ini.

Dalam catatan perjalanan setahun inilah kedua pasangan ini baru melangkah, karena kekuatan sebenarnya saat ini sedang ditunggu masyarakat, dan RPJMD adalah arah yang ditempuh akan dibawa kemana Kabupaten Garut ini, dengan dinamika masyarakatnya yang begitu melesat tingkat pengetahuannya. Semua ini membutuhkan tangan-tangan terampil kita semua, buka hanya teoretis belaka, namun apikasinya. Kemudian orang pun lebih mengenal *Talk Less Do More*. Semoga !

*Untuk akses informasi : klik [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)*